

Pemerintah Kota Batam



PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN BULANG

2026

Bersinergi Membangun Bulang
Untuk Batam Maju dan Masyarakat
Sejahtera



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 372 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Batam tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

9. Peraturan. . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
16. Peraturan...

16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 4);
18. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 33 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Batam Nomor 1722);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.

KESATU : Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II tahun berjalan.

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I PENDAHULUAN
- b. BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERJALAN
- c. BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- d. BAB IV PENUTUP

KETIGA : Penjabaran Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XLV Surat Keputusan ini.

KEEMPAT : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA menjadi:

- a. acuan penyusunan Perubahan RKA-Perangkat Daerah;

b. landasan...

- b. landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026; dan
- c. bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memastikan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah telah disusun berlandaskan Perubahan RKPD.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 26 Agustus 2026

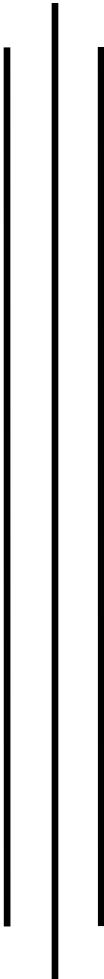
WALI KOTA BATAM,



AMSAKAR ACHMAD

LAMPIRAN XLI : KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 372 TAHUN 2026
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN BULANG TAHUN 2026



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya maka Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bulang Kota Batam Tahun 2026 dapat terselesaikan.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bulang Kota Batam memuat rumusan pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Bulang Tahun Anggaran 2026 yang mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Bulang Batam Tahun 2025-2029.

Dalam mendorong efektivitas pemerintahan dan pembangunan saat ini, kondisi serius yang perlu dipertimbangkan dalam setiap pengambilan keputusan adalah kecenderungan lingkungan yang berlangsung pesat dan terus berubah sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Perkembangan lingkungan strategis tersebut akan mempengaruhi perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebijakan dalam pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Untuk mengantisipasi perkembangan tersebut, maka setiap organisasi akan dituntut terus melakukan adaptasi dan inovasi, agar tetap memiliki peran dalam lingkungan yang senantiasa berubah tersebut, sehingga pencapaian target dan sasaran pembangunan dapat terwujud melalui penyempurnaan kebijakan, program dan kegiatan.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Bulang Kota Batam Tahun 2026, semoga Perubahan Renja ini bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Batam, 20 Agustus 2026
Camat Bulang



BORHAN,ST
NIP. 19750404 200701 1 021

DAFTAR ISI

KATA PENGANTARii

DAFTAR ISI..... iii

DAFTAR TABELiv

BAB I PENDAHULUAN.....5

1.1 Latar Belakang 5

1.2 Landasan Hukum..... 7

1.3 Maksud dan Tujuan..... 8

1.4. Sistematika Penulisan 8

BAB II..... 10

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai
dengan Triwulan II Tahun 2026..... 10

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bulang..... 24

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat
Daerah..... 24

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN BULANG 26

BAB IV PENUTUP..... 40

4.1 Catatan Penting..... 40

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan..... 40

4.3 Rencana Tindak Lanjut 41

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekaptulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II/Mei Tahun 2026 Kota Batam.....9

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bulang Kota Batam sampai denga triwulan II/Mei tahun 2026.....22

Tabel 3.1. Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bulang.....24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan Pasal 276 (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kepala Perangkat Daerah Kabupaten/Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 343 (1) disebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pada pasal Pasal 351 dan 352 disebutkan bahwa berdasarkan Rancangan Perubahan RKPD yang telah memperoleh persetujuan Kepala Daerah, Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada surat edaran dan Rancangan Perubahan RKPD.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada:

- a. Rancangan Perubahan RKPD;
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, kabupaten/kota sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah terdiri

atas:

- a. Perumusan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
- b. Penyajian Rancangan Perubahan Renja Perangkat

Daerah. Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah mencakup:

- a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- b. analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan; dan
- c. penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan;
- c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
- d. penutup.

Berdasarkan Surat Edaran Walikota Batam Nomor 44 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 maka Kecamatan Bulang Kota Batam menyusun Perubahan Rencana Kerja yang berpedoman kepada Perubahan RKPD Tahun 2026, setelah melakukan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2026.

Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Renja Kerja Kecamatan Bulang Kota Batam Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembar Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, *terakhir dengan undang-undang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku/terbaru*);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pemabangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 435);

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri 900.1-861 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 36 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 6, Nomor Register Peraturan Daerah Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau : 639/2023);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam (RPJMD) Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
13. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 97 Tahun 2026 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Bulang Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 33 Tahun 2026 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2026 Nomor 1722).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bulang Kota Batam Tahun 2026 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu satu tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Bulang Tahun 2025 – 2029 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bulang Kota Batam Tahun 2026 yaitu :

- 1) Penyesuaian terhadap prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah dalam mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah.
- 2) Sebagai pedoman dan arah dalam menyusun perubahan anggaran Kecamatan Bulang tahun 2026 dan sebagai dasar penentuan Perubahan KUA dan PPAS, serta Perubahan RKA Tahun Anggaran 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyajian Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bulang Kota Batam terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II (TAHUN BERJALAN)

- 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II (Tahun Berjalan)
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

- 4.1 Catatan Penting
- 4.2 Kaidah Pelaksanaan
- 4.3 Rencana Tindak Lanjut

BAB II

EVALUASI RENJA KECAMATAN BULANG SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2026

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2026

Evaluasi bertujuan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari pelaksanaan kinerja terhadap Renja tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya. Realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD. Adapun realisasi program/kegiatan adalah sebagai berikut:

2.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target 100%, terealisasi 46,67% sampai dengan Triwulan II masih belum mencapai target tahunan sehingga capaian program belum optimal.
 - Kegiatan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja sebesar 100%, sampai Triwulan II masih terdapat subkegiatan yang belum terealisasi.
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target pemenuhan pelayanan umum perkantoran sebesar 100%, terealisasi sebesar 29.32%.
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target 100%, terealisasi sebesar 37.76%.
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan target 100%, terealisasi sebesar 36.44%.
 - Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dengan target 100%, terealisasi sebesar 5.31%, sehingga belum memenuhi target yang direncanakan.

2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

- Program Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target 100%, terealisasi di Triwulan II sebesar 100% atau capaian realisasi sebesar 100%.
 - Kegiatan Pengadaan Mebel dengan target 100 %, terealisasi di Triwulan II sebesar 100 % atau capaian realisasi sebesar 100%.
 - Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan target 100 %, terealisasi di Triwulan II sebesar 100 % atau capaian realisasi sebesar 100%.
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan target 100%, terealisasi di Triwulan II sebesar 100% atau capaian realisasi sebesar 100%.
 - Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dengan target 100 %, terealisasi di Triwulan II sebesar 100 % atau capaian realisasi sebesar 100 %.

2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan :

Berdasarkan evaluasi realisasi kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun Berjalan, tidak terdapat program maupun kegiatan yang realisasinya melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 s/d Triwulan II

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Bulang

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renja Kecamatan Bulang)	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
3	4	5	7	10	11
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	100.00%	46.67%	47%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100.00%	45.54%	46%
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 org/bulan	69 org/bulan	100%
7.01.01.2.02.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 laporan	5 laporan	39%
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	100.00%	0.00%	0%
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	0.00%	0%
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100.00%	29.32%	29%
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	0.00%	0%
7.01.01.2.06.0002 -	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	3 paket	100%

7.01.01.2.06.0004 -	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	2 paket	45%
7.01.01.2.06.0005 -	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	0.00%	0%
7.01.01.2.06.0009 -	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 laporan	1 laporan	13%
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100.00%	100%	100%
7.01.01.2.07.0005 -	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 unit	4 unit	100%
7.01.01.2.07.0006 -	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 unit	4 unit	100%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100%	37.76%	38%
7.01.01.2.08.0002 -	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	4 laporan	33%
7.01.01.2.08.0004 -	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5 laporan	47%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100.00%	36.44%	36%
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	4 unit	44%
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24 unit	0.00%	0%
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	82%	82%	100%
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tingkat kehadiran Lembaga kemasyarakatan Kelurahan (RT, RW, LPM, Karang Taruna, Posyandu, PKK) Kecamatan Bulang	82%	82%	100%

7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	4 Laporan	4 Laporan	100%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi kelembagaan masyarakat (RT,RW,LPM,PKK, Posyandu,Karang Taruna) pada pembangunan tingkat Kecamatan Bulang	100.00%	0.00%	0%
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan kejeahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana Kecamatan Bulang	100.00%	0.00%	0%
7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100.00%	0.00%	0%
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terlaksana di Kecamatan Bulang	20%	44.10%	44%
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Kecamatan Bulang	12 Laporan	5 laporan	40%

7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	5 laporan	40%
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase peran kecamatan dalam peningkatan wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Bulang	75.50%	44.13%	44%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan Kecamatan Bulang	9 Kegiatan	4 kegiatan	44%
7.01.04.2.02.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan	1000 orang	0.00%	0%
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	2000 orang	2000 orang	100%
7.0105.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen	3 dokumen	26%
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100.00%	38.29%	38%
	KELURAHAN BULANG LINTANG				

7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100.00%	37.19%	37%
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 unit	0.00%	0%
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 unit	4 unit	100%
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 unit	1 unit	29%
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 unit	0.00%	0%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100.00%	46.43%	46%
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	5 laporan	46%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat partisipasi Lembaga Kemasyarakatan (RT, WR, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) pada pembangunan tingkat Kecamatan Bulang	100.00%	5.68%	6%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana di Kecamatan Bulang	100.00%	5.68%	6%
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 LKK	6 LKK	100%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	100.00%	0.00%	0%
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas	1 pokmas	100%
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana Kecamatan	100.00%	0.00%	0%

		Bulang			
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100.00%	0.00%	0%
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100.00%	29.31%	29%
	KELURAHAN PULAU BULUH				
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100.00%	29.52%	30%
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 unit	0.00%	0%
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 unit	4 unit	100%
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 unit	0.00%	0%
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 unit	0.00%	0%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100.00%	28.57%	29%
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	3 laporan	29%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat partisipasi Lembaga Kemasyarakatan (RT, WR, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) pada pembangunan tingkat Kecamatan Bulang	100.00%	5.14%	5%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana di Kecamatan Bulang	100.00%	5.31%	5%

7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 LKK	6 LKK	100%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	100.00%	0.00%	0%
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas	1 pokmas	100%
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana Kecamatan Bulang	100.00%	0.00%	0%
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100.00%	0.00%	0%
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100.00%	38.45%	38%
	KELURAHAN BATU LEGONG				
7.01.01.2.06	7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100.00%	37.37%	37%
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 unit	0.00%	0%
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 unit	3 unit	100%
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 unit	1 unit	29%
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 unit	0.00%	0%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100.00%	46.43%	46%

7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	5 laporan	46%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat partisipasi Lembaga Kemasyarakatan (RT, WR, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) pada pembangunan tingkat Kecamatan Bulang	100.00%	5.62%	6%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana di Kecamatan Bulang	100.00%	5.83%	6%
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 LKK	6 LKK	100%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	100.00%	0.00%	0%
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas	1 pokmas	100%
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan kejeahτεραan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana Kecamatan Bulang	100.00%	0.00%	0%
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100.00%	0.00%	0%
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100.00%	29.31%	29%
	KELURAHAN SETOKOK				
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100.00%	29.52%	30%
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 paket	0.00%	0%

7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	3 paket	100%
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	0.00%	0%
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	0.00%	0%
7.01.01.2.08	- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100.00%	28.57%	29%
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3 laporan	29%
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat partisipasi Lembaga Kemasyarakatan (RT, WR, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) pada pembangunan tingkat Kecamatan Bulang	100.00%	6.50%	7%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana di Kecamatan Bulang	100.00%	6.78%	7%
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 LKK	6 LKK	100%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	100.00%	0.00%	0%
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas	1 pokmas	100%
7.01.03.2.06 -	Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana Kecamatan Bulang	100.00%	0.00%	0%
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100.00%	0.00%	0%

7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100.00%	38.29%	38%
	KELURAHAN PANTAI GELAM				
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100.00%	37.19%	37%
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 unit	0.00%	0%
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 unit	3 unit	100%
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 unit	1 unit	29%
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 unit	0.00%	0%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100.00%	46.43%	46%
7.01.01.2.08.0002 -	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	5 laporan	46%
7.01.03 -	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat partisipasi Lembaga Kemasyarakatan (RT, WR, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) pada pembangunan tingkat Kecamatan Bulang	100.00%	6.52%	7%
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana di Kecamatan Bulang	100.00%	6.79%	7%
7.01.03.2.02.0001 -	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 LKK	6 LKK	100%
7.01.03.2.02.0002 -	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	100.00%	0.00%	0%

7.01.03.2.02.0003 -	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas	1 pokmas	100%
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan kejeahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana Kecamatan Bulang	100.00%	0.00%	0%
7.01.03.2.06.0003 -	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100.00%	0.00%	0%
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100.00%	38.29%	38%
	KELURAHAN TEMOYONG				
7.01.01.2.06	- Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100.00%	37.19%	37%
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 unit	0.00%	0%
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 unit	3 unit	100%
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 unit	1 unit	29%
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 unit	0.00%	0%
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100.00%	46.43%	46%
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	5 laporan	46%
7.01.03	7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat partisipasi Lembaga Kemasyarakatan (RT, WR, LPM, PKK, Posyandu, Karang Taruna) pada pembangunan tingkat Kecamatan Bulang	100.00%	5.91%	6%

7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana di Kecamatan Bulang	100.00%	6.14%	6%
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 LKK	6 LKK	100%
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	100.00%	0.00%	0%
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 pokmas	1 pokmas	100%
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana Kecamatan Bulang	100.00%	0.00%	0%
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100.00%	0.00%	0%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bulang

Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bulang Kota Batam dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Kecamatan Bulang Tahun 2026 s/d Triwulan II

No	Indikator Sasaran PD	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026		Realisasi/ Proyeksi Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026 TW II		Catatan Analisis
		Satuan	Volume	Satuan	Volume	
1	2	3	4	5	6	7
	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Bulang	Nilai	97	Nilai	-	Survey dilakukan pada akhir tahun

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan isu-isu penting pelayanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Permasalahan pembangunan adalah penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Berdasarkan analisis kritikal, maka dapat diidentifikasi isu-isu strategis yang sedang dihadapi oleh Kecamatan Bulang Kota Batam adalah sebagai berikut:

- a. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan, dengan fokus pada isu:
 - 1) Menghadirkan *Clean Government*;
 - 2) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan integritas aparatur pemerintahan, dan;
 - 3) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan.
- b. Peningkatan kualitas, pengembangan dan pembangunan infrastruktur wilayah, dengan fokus pada isu peningkatan

sarana dan prasarana utilitas kawasan permukiman.

- c. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dengan fokus pada pengelolaan persampahan.
- d. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, dengan fokus pada:
 - 1) Pengembangan konsep Kota Pintar (*Smart city*),
 - 2) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan,
 - 3) Meningkatkan kualitas pengelolaan data pembangunan.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka Kecamatan Bulang harus memberikan perhatian besar terhadap isu reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Pelayanan kepada masyarakat harus ditingkatkan dengan efektif dan efisien, karena tingginya tuntutan masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap kinerja (*performance*) dan kualitas pelayanan (kejelasan prosedur, waktu, biaya, sarana dan prasarana serta kompetensi aparatur. Hal ini merupakan tantangan besar di masa yang akan datang.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN BULANG

Program dan kegiatan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bulang Kota Batam pada Tahun 2026 didasarkan pada hasil evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan dan mengacu pada prioritas Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2026.

Program dan Kegiatan serta Subkegiatan yang mengalami perubahan (penambahan/pengurangan/pergeseran) yaitu sebagai berikut;

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listirk/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4) Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5) Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Subkegiatan Pengadaan Mebel
 - 2) Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah
 - 1) Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik
 - 2) Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
 - 2) Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- a. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan
di Tingkat Kecamatan

- 1) Subkegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - a. Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
 - 1) Subkegiatan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - a. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - 1) Subkegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - 1) Subkegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - 2) Subkegiatan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, and Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional
 - 3) Subkegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Tabel 3.1 Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Target dan Pagu pada Perubahan Rencanana Kerja (Renja) Tahun 2026

					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program (Outcome)/Kegiatan (Output)/Subkegiatan (Sub Output)	Target		Pagu				Keterangan
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2026	Sebelum	Sesudah	Selisih	
1					3	4	8	9		11	12		20
					KECAMATAN BULANG				21.555.213.813,00	20.373.606.881,00	25,557,085,566.00	-2.841.445.627,00	
7					UNSUR KEWILAYAHAN				21.555.213.813,00	20.373.606.881,00	25,557,085,566.00	-2.841.445.627,00	
7	01				KECAMATAN				21.555.213.813,00	20.373.606.881,00	25,557,085,566.00	-2.841.445.627,00	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD Nilai SAKIP PD	73.52 97 Nilai Nilai	97 73.52 Nilai Nilai	18.419.513.462,00	17.948.673.506,00	16,457,625,579.00	-2.364.691.151,00	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	100 %	100 %	14.902.980,00	15,202,980.00	10.664.980,00	-4.238.000,00	
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							-	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	3.764.980,00	3,764,980.00	3,764,980.00	-	
7	01	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							-	
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	11.138.000,00	11,438,000.00	6,900,000.00	(4,238,000.00)	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	100 %	100 %	17.183.143.840,00	16,647,162,080.00	16,647,162,080.00	-2.686.783.949,00	
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							-	
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	17.033.299.100,00	16,523,362,080.00	14,372,559,891.00	-2.660.739.209,00	
7	01	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							-	
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	149.844.740,00	123,800,000.00	123,800,000.00	-	

7	01	01	2	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	0 Orang	0,00		22.310.000,00	22.310.000,00	
7	01	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			0,00		22.310.000,00	22.310.000,00	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 Persentase	100 Persentase	172.689.000,00	190.575.000,00	160.961.000,00	(11.728.000,00)	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							-	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	974.000,00	974.000	974.000	-	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							-	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	16.479.300,00	16,479,300.00	16,479,300.00	-	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							-	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	57.871.300,00	57,871,300.00	57,871,300.00	-	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							-	
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	23.264.400,00	23,264,400.00	23,264,400.00	-	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							-	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	74.100.000,00	91,986,000.00	62.372.000	(11.728.000,00)	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	100 Persentase	100 Persentase	602.066.442,00	560,930,619.00	632.947.197	30.880.755	
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel							-	
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Unit	15 Unit	349.417.122,00	318,019,662.00	318,019,662.00	-	
7	01	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							-	
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit	13 Unit	252.649.320,00	242,910,957.00	314,927,535.00	62.278.215	

7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 Persentase	100 Persentase	170.111.200,00	228.562.827	228.562.827	58.451.627,00	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							-	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	70.540.000,00	144,548,451.00	144,548,451.00	74.008.451,00	
												-	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							-	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	99.571.200,00	84,014,376.00	84,014,376.00	(15.556.824,00)	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	100 Persentase	100 Persentase	276.600.000,00	306,240,000.00	503.016.416,00	226.416.416,000	
7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							-	
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 Unit	14 Unit	254.600.000,00	242,320,000.00	232,760,000.00	(21.840.000,000)	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							-	
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	3 Unit	3 Unit	22.000.000,00	63,920,000.00	47,230,000.00	25.230.000,00	
7	01	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							-	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	1 Unit	0	0	223.026.416,00	223.026.416,00	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Tingkat Kecamatan	100 %	100 %	230.000.000,00	115,103,000.00	115,103,000.00	(114.897.000)	

7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Tingkat Kehadiran Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (RT,RW, LPM, Karang Taruna, Posyandu, PKK) Kecamatan Bulang	6 LKK	6 LKK	230.000.000,00	115,103,000.00	115,103,000.00	(114.897.000)	
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait							-	
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	10 Laporan	10 Laporan	230.000.000,00	115,103,000.00	115,103,000.00	(114.897.000)	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi kelembagaan masyarakat (RT,RW, LPM, PKK, Karang Taruna) pada pembangunan tingkat Kecamatan Bulang	100 %	100 %	38.160.000,00	38.820.000,00	38.820.000,00	660.000,00	
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana di Kecamatan Bulang	100 %	100 %	38.160.000,00	38.820.000,00	38.820.000,00	660.000,00	
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah							-	
						Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	100 Keluarga	38.160.000,00	38,820,000.00	38,820,000.00	660.000,00	
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terlaksana di Kecamatan Bulang	100 %	100 %	19.800.000,00	20,700,000.00	20,700,000.00	900.000,00	

7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12 Laporan	12 Laporan	19.800.000,00	20,700,000.00	20,700,000.00	900.000,00	
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia							-	
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	-	-	19.800.000,00	20,700,000.00	20,700,000.00	900.000,00	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Peran Kecamatan Dalam Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Kerukunan Antar Umat Beragama di Kecamatan Bulang	75.50 %	75.50 %	2.847.740.351,00	2,250,310,375.00	2,484,322,875.00	(363.417.476,00)	
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi sesuai kebutuhan di Kecamatan Bulang	9 kegiatan	9 kegiatan	2.847.740.351,00	2,250,310,375.00	2,484,322,875.00	(363.417.476,00)	
						Jumlah Kegiatan Forum Pimpinan yang dilaksanakan Kecamatan Bulang							
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia							-	

						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	1000 Orang	1000 Orang	481.690.339,00	458,548,783.00	428,561,283.00	(53.129.056,00)	
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional							-	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1000 Orang	1000 Orang	1.179.469.126,00	783,215,006.00	783,215,006.00	(396.254.120,00)	
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan							-	
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10 Dokumen	10 Dokumen	1.186.580.886,00	1,008,546,586.00	1,272,546,586.00	85.965.700,00	
					KELURAHAN BULANG LINTANG				2.294.453.928,70	1.122.277.759,00	1.162.449.355,00	(1.132.004.573,70)	
7					UNSUR KEWILAYAHAN				2.294.453.928,70	1.122.277.759,00	1.162.449.355,00	(1.132.004.573,70)	
7	01				KECAMATAN				2.294.453.928,70	1.122.277.759,00	1.162.449.355,00	(1.132.004.573,70)	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	97 Nilai	97 Nilai	84.755.600,00	70.705.600,00	70.705.600,00	-14.050.000,00	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	100 Persentase	100 Persentase	76.355.600,00	62.305.600,00	62.305.600,00	-14.050.000,00	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							-	

						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	922.700,00	922.700,00	922.700,00		
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							-	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	8.651.100,00	8,651,100.00	8,651,100.00	-	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							-	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	64.224.200,00	50,174,200.00	50,174,200.00	-14.050.000,00	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							-	
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2.557.600,00	2,557,600.00	2,557,600.00	-	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 Persentase	100 Persentase	8.400.000,00	8,400,000.00	8,400,000.00	-	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							-	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	8.400.000,00	8,400,000.00	8,400,000.00	-	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat	100 %	100 %	2.209.698.328,70	1.051.572.159,00	1.091.743.755,00	-1.117.954.573,70	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100 Persentase	100 Persentase	2.209.698.328,70	1.051.572.159,00	1.068.448.821,00	-1.141.249.507,70	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							-	
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	22.582.000,00	20.838.200,00	37.714.862,00	15.132.862,00	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							-	

						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	4 Unit	2.166.266.328,70	988.801.089,00	988.801.089,00	-1.177.465.239,70	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							-	
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	20.850.000,00	41.932.870,00	41.932.870,00	21.082.870,00	
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang terlaksana	undefined undefined	undefined undefined	0	0	23.294.934,00	23.294.934,00	
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah							-	
						Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	-	90 Keluarga	0	0	23,294,934.00	23,294,934.00	
					KELURAHAN PULAU BULUH				3.398.697.400,00	1.255.214.747,00	1.272.091.409,00	-2.126.605.991,00	
7					UNSUR KEWILAYAHAN				3.398.697.400,00	1.255.214.747,00	1.272.091.409,00	-2.126.605.991,00	
7	01				KECAMATAN				3.398.697.400,00	1.255.214.747,00	1.272.091.409,00	-2.126.605.991,00	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	97 Nilai	97 Nilai	51.755.600,00	37.705.600,00	37.705.600,00	(14.050.000,00)	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 Persentase	100 Persentase	43.355.600,00	29.305.600,00	29.305.600,00	(14.050.000,00)	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							-	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	922.700,00	922.700,00	922.700,00		
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							-	

						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	8.651.100,00	8,651,100.00	8,651,100.00	-	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							-	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	31.224.200,00	17,174,200.00	17,174,200.00	(14.050.000,00)	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							-	
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2.557.600,00	2,557,600.00	2,557,600.00	-	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	undefined undefined	undefined undefined	8.400.000,00	8,400,000.00	8,400,000.00	-	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							-	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	8.400.000,00	8,400,000.00	8,400,000.00	-	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat	100 %	100 %	3.346.941.800,00	1.217.509.147,00	1.234.385.809,00	(2.112.555.991,00)	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100 Persentase	100 Persentase	3.308.781.800,00	1.179.019.147,00	1.195.895.809,00	-2.112.885.991,00	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							-	
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	22.582.000,00	24,150,000.00	41,026,662.00	18.444.662,00	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							-	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	3 Unit	3.265.349.800,00	1,112,936,277.00	1,112,936,277.00	(2.152.413.523,00)	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							-	

						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	20.850.000,00	41,932,870.00	41,932,870.00	21.082.870,00	
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Pesentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan terlaksana	100 Persentase	100 Persentase	38.160.000,00	38,490,000.00	38,490,000.00	330.000,00	
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah							-	
						Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	100 Keluarga	38.160.000,00	38,490,000.00	38,490,000.00	330.000,00	
					KELURAHAN BATU LEGONG				3.020.989.640,00	1.156.087.005,00	1.172.963.667,00	-1.848.025.973,00	
7					UNSUR KEWILAYAHAN				3.020.989.640,00	1.156.087.005,00	1.172.963.667,00	-1.848.025.973,00	
7	01				KECAMATAN				3.020.989.640,00	1.156.087.005,00	1.172.963.667,00	-1.848.025.973,00	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	97 Nilai	97 Nilai	84.755.600,00	70.405.600,00	70.405.600,00	-14.350.000,00	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 Persentase	100 Persentase	76.355.600,00	62.005.600,00	62.005.600,00	-14.350.000,00	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							-	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	922.700,00	922.700,00	922.700,00		
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							-	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	8.651.100,00	8,651,100.00	8,651,100.00	-	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							-	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	64.224.200,00	49,874,200.00	49,874,200.00	(14.350.000,00)	

7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							-	
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2.557.600,00	2,557,600.00	2,557,600.00	-	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	undefined undefined	undefined undefined	8,400,000.00	8,400,000.00	8,400,000.00	-	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							-	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	8,400,000.00	8,400,000.00	8,400,000.00	-	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100 %	100 %	2.936.234.040,00	1.085.681.405,00	1.102.558.067,00	(1.833.675.973,00)	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	undefined undefined	undefined undefined	2.898.074.040,00	1.047.191.405,00	1.064.068.067,00	(1.834.005.973,00)	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							-	
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	22.582.000,00	22.582.000,00	39.458.662,00	16.876.662,00	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							-	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	3 Unit	2.854.642.040,00	982,676,535.00	982,676,535.00	(1.871.965.505,00)	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							-	
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	20.850.000,00	41,932,870.00	41,932,870.00	21.082.870,00	
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Pesentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan terlaksana	100 Persentase	100 Persentase	38.160.000,00	38.490.000,00	38.490.000,00	330.000,00	
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak							-	

					Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah								
						Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	100 Keluarga	38.160.000,00	38.490.000,00	38.490.000,00	330.000,00	
					KELURAHAN SETOKOK				2.759.651.361,98	975.573.133,00	992.449.795,00	-1.767.201.566,98	
7					UNSUR KEWILAYAHAN				2.759.651.361,98	975.573.133,00	992.449.795,00	-1.767.201.566,98	
7	01				KECAMATAN				2.759.651.361,98	975.573.133,00	992.449.795,00	-1.767.201.566,98	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	97 Nilai	97 Nilai	51.755.600,00	37.705.600,00	37.705.600,00	-14.050.000,00	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 Persentase	100 Persentase	43.355.600,00	37.705.600,00	37.705.600,00	-14.050.000,00	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							-	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	922.700,00	922.700,00	922.700,00		
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							-	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	8.651.100,00	8,651,100.00	8,651,100.00	-	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							-	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	31.224.200,00	17,174,200.00	17,174,200.00	-14.050.000,00	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							-	
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2.557.600,00	2,557,600.00	2,557,600.00	-	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	100 Persentase	100 Persentase	8.400.000,00	8,400,000.00	8,400,000.00	-	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							-	

						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	8.400.000,00	8,400,000.00	8,400,000.00	-	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100 %	100 %	2.707.895.761,98	937.867.533,00	954.744.195,00	-1.753.151.566,98	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100 Persentase	100 Persentase	2.669.735.761,98	899.377.533,00	916.254.195,00	-1.753.481.566,98	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							-	
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	22.582.000,00	22.572.000,00	39.448.662,00	16.866.662,00	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							-	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	3 Unit	2.626.303.761,98	834,872,663.00	834,872,663.00	-1.791.431.098,98	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							-	
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	20.850.000,00	41,932,870.00	41,932,870.00	21.082.870,00	
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Pesentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan terlaksana	100 Persentase	100 Persentase	38.160.000,00	38.490.000,00	38.490.000,00	330.000,00	
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah							-	
						Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	100 Keluarga	38.160.000,00	38.490.000,00	38.490.000,00	330.000,00	
					KELURAHAN PANTAI GELAM				2.083.445.560,00	1.031.124.562,00	1.048.001.224,00	-1.035.444.336,00	

7					UNSUR KEWILAYAHAN				2.083.445.560,00	1.031.124.562,00	1.048.001.224,00	-1.035.444.336,00	
7	01				KECAMATAN				2.083.445.560,00	1.031.124.562,00	1.048.001.224,00	-1.035.444.336,00	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	97 Nilai	97 Nilai	84.755.600,00	70.705.600,00	70.705.600,00	-14.050.000,00	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 Persentase	100 Persentase	76.355.600,00	62.305.600,00	62.305.600,00	-14.050.000,00	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							-	
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	922.700,00	922.700,00	922.700,00		
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							-	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	8.651.100,00	8,651,100.00	8,651,100.00	-	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							-	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	64.224.200,00	50,174,200.00	50,174,200.00	-14.050.000,00	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							-	
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2.557.600,00	2,557,600.00	2,557,600.00	-	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	undefined undefined	undefined undefined	8,400,000.00	8,400,000.00	8,400,000.00	-	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							-	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	8,400,000.00	8,400,000.00	8,400,000.00	-	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	100 %	100 %	1.998.689.960,00	960.418.962,00	977.295.624,00	-1.021.394.336,00	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terlaksana	undefined undefined	undefined undefined	1.960.529.960,00	921.928.962,00	938.805.624,00	-1.021.724.336,00	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah							-	

					Perencanaan Pembangunan di Kelurahan								
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	22.582.000,00	24.150.000,00	41.026.662,00	18.444.662,00	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							-	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	3 Unit	1.917.097.960,00	855.846.092,00	855.846.092,00	-1.061.251.868,00	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							-	
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	20.850.000,00	41.932.870,00	41.932.870,00	21.082.870,00	
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Pesentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan terlaksana	100 Persentase	100 Persentase	38.160.000,00	38.490.000,00	38.490.000,00	330.000,00	
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah							-	
						Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	100 Keluarga	38.160.000,00	38.490.000,00	38.490.000,00	330.000,00	
					KELURAHAN TEMOYONG				3.510.290.532,50	1.133.615.600,00	1.150.492.262,00	-2.359.798.270,50	
7					UNSUR KEWILAYAHAN				3.510.290.532,50	1.133.615.600,00	1.150.492.262,00	-2.359.798.270,50	
7	01				KECAMATAN				3.510.290.532,50	1.133.615.600,00	1.150.492.262,00	-2.359.798.270,50	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Pelayanan Kesekretariatan Perangkat Daerah	97 Nilai	97 Nilai	84.755.600,00	70.705.600,00	70.705.600,00	-14.050.000,00	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	100 Persentase	100 Persentase	76.355.600,00	62.305.600,00	62.305.600,00	-14.050.000,00	
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi							-	

					Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	922.700,00	922.700,00	922.700,00	0,00	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							-	
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	8.651.100,00	8,651,100.00	8,651,100.00	-	
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							-	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	64.224.200,00	50,174,200.00	50,174,200.00	-14.050.000,00	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							-	
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2.557.600,00	2,557,600.00	2,557,600.00	-	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	undefined undefined	undefined undefined	8.400.000,00	8,400,000.00	8,400,000.00	-	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							-	
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	8.400.000,00	8,400,000.00	8,400,000.00	-	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	100 %	-	3.425.534.932,50	1.062.910.000,00	1.079.786.662,00	-2.345.748.270,50	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	100 Persentase	-	3.387.374.932,50	1.024.420.000,00	1.041.296.662,00	-2.346.078.270,50	
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							-	
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	22.582.000,00	24.420.000,00	41.296.662,00	18.714.662,00	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							-	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	16 Unit	3 Unit	3.343.942.932,50	958.067.130,00	958.067.130,00	-2.385.875.802,50	

7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							-	
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	20.850.000,00	41,932,870.00	41,932,870.00	21.082.870,00	
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Pesentase kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan terlaksana	100 Persentase	100 Persentase	38.160.000,00	38.490.000,00	38.490.000,00	330.000,00	
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah							-	
						Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	100 Keluarga	100 Keluarga	38.160.000,00	38.490.000,00	38.490.000,00	330.000,00	
JUMLAH									38.622.742.236,18	27.047.499.687,00	25.512.215.898,00	-13.110.526.338,18	

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bulang Kota Batam Tahun 2026 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Kecamatan Bulang 2025 - 2029 dalam menunjang tercapainya visi dan misi daerah serta target dan sasaran pembangunan melalui Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) Pemerintah Kota Batam Tahun 2026.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bulang Batam sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2026 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan II.

4.1 Catatan Penting

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang membidangi urusan terkait Kewilayahan Kecamatan Bulang Kota Batam masih mempunyai sejumlah pekerjaan yang belum optimal, maka dari itu dalam melakukan kewajibannya perlu untuk segera diselesaikan.

4.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bulang Kota Batam Tahun 2026 maka disampaikan kaidah-kaidah pelaksanaannya bahwa dengan ditetapkannya renja ini, maka:

1. Perubahan Rencana Kerja ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Bulang Kota Batam Tahun Anggaran 2026;
2. Perubahan Rencana Kerja ini akan dijadikan pedoman pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan untuk mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai kondisi yang lebih baik di masa mendatang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi sumber daya yang dimiliki. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat terlihat program dan kegiatan yang telah direncanakan dengan target-target tertentu, dan bagaimana pelaksanaan dari program kegiatan tersebut oleh masing-masing bidang yang bersangkutan. Dengan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan program maupun kegiatan diharapkan mampu untuk mendukung tercapainya target yang telah ditentukan.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bulang Kota Batam sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan yang mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan kegiatan apabila terdapat ketidaksesuaian skenario dari dokumen perencanaan induk daerah (RPJMD) yang berimplikasi/berdampak terhadap dokumen perencanaan ini, maka akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Bulang Kota Batam Tahun 2026 disusun sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan dan pelaksanaan kegiatan Tahun 2026.

WALIKOTA BATAM



AMSAKAR ACHMAD